

“KORUPSI DALAM PELAYANAN PUBLIK: TANTANGAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA”

Iwan Ridwan Paturochman ^{*1}

Alysa Rahma Wulan²

Maharani Putri Buana³

Elsa Resta Pania⁴

^{1,2,3,4} Universitas Siliwangi

*e-mail: Iwanridwanpaturochan@yahoo.com¹, alysarahmaaa@gmail.com²,
maharaniputribuana@gmail.com³, elsarestapania@gmail.com⁴

Abstrak

Korupsi dalam pelayanan publik masih menjadi isu serius di Indonesia, karena merugikan negara dan mengurangi kualitas layanan publik. Penelitian ini menganalisis praktik korupsi, hambatan dalam penerapan sistem pemerintahan yang baik, dan langkah-langkah pencegahan melalui metode literature review. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tantangan utama termasuk lemahnya penegakan hukum, budaya birokrasi yang mengutamakan kepentingan pribadi, perlawanan dari dalam, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Beberapa strategi yang bisa diterapkan meliputi penguatan lembaga pencegah korupsi, digitalisasi layanan publik, meningkatkan transparansi anggaran, dan membangun budaya integritas. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan layanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Korupsi, Pelayanan Publik, Good Governance.

Abstract

Corruption in public services remains a serious issue in Indonesia, as it harms the state and reduces the quality of public services. This study analyzes corrupt practices, obstacles to the implementation of good governance systems, and preventive measures through a literature review. The results reveal that key challenges include weak law enforcement, a bureaucratic culture that prioritizes personal interests, internal resistance, and low public participation. Several strategies that can be implemented include strengthening corruption prevention institutions, digitizing public services, increasing budget transparency, and building a culture of integrity. Collaboration between the government, civil society, and the private sector is essential to creating clean, transparent, and accountable public services.

Keywords: Corruption, Public Services, Good Governance.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, khususnya di bidang publik. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga mengurangi mutu pelayanan publik, yang seharusnya menjadi hak semua warga negara. Situasi ini mencerminkan kurangnya penerapan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, yang menekankan tanggung jawab, keterbukaan, efisiensi, dan keterlibatan masyarakat (World Bank, 1992).

Di Indonesia, banyak langkah telah diambil untuk memerangi korupsi, mulai dari pembentukan institusi khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan reformasi dalam birokrasi dan pelaksanaan sistem layanan berbasis digital. Meskipun demikian, praktik korupsi tetap sering terjadi, terutama dalam bentuk pungutan liar, penyalahgunaan kekuasaan, dan kolusi di sektor publik (Kurniawan, 2017). Ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, baik dari segi struktur maupun budaya.

Menurut Dwiyanto (2018), faktor utama yang menghambat usaha pemberantasan korupsi dalam sektor publik adalah masih adanya budaya birokrasi yang bersifat patrimonial serta lemahnya sistem pengawasan. Situasi ini sering kali mengakibatkan layanan publik lebih memprioritaskan kepentingan individu atau kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengevaluasi kembali cara penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara menyeluruh agar reformasi birokrasi dapat berhasil.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis good governance dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mengatasi korupsi dalam layanan publik di Indonesia serta mengidentifikasi pendekatan strategis untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan memiliki integritas.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya korupsi dalam sektor pelayanan publik di Indonesia?
2. Apa saja hambatan utama dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik guna menghindari korupsi?
3. Taktik apa yang direkomendasikan dalam kajian akademik untuk melawan tindakan korupsi dalam pelayanan publik di Indonesia?

C. Tujuan Kajian

Jurnal ini memiliki tiga tujuan utama sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan berbagai jenis masalah korupsi yang terjadi dalam pelayanan publik di Indonesia serta hubungannya dengan kurangnya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
2. Menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan penglibatan masyarakat.
3. Mengidentifikasi untuk mencegah korupsi dalam pelayanan publik.

D. Kajian Literatur

1. Korupsi dalam Pelayanan Publik

Korupsi dalam layanan publik adalah isu mendasar yang menghalangi kemajuan di berbagai negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan pribadi (Transparency International, 2022). Dalam konteks pelayanan publik, korupsi sering diwujudkan dalam bentuk pungutan. Liar, suap, manipulasi anggaran, nepotisme dalam rekrutmen, serta penyalahgunaan Fasilitas negara (Rose-Ackerman, 1999). Di Indonesia, praktik korupsi telah menjadi masalah mendalam dalam sistem pemerintahan. Dwiyanto (2018) mengungkapkan bahwa manajemen publik sering kali tidak berhasil menyediakan layanan yang berkualitas dan menjadi. Tempat yang subur untuk praktik eksploitasi ekonomi. Hal ini diperkuat dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW, 2021) yang menunjukkan bahwa sektor pelayanan publik seperti perizinan, pengadaan barang/jasa, dan administrasi kependudukan masih rentan terhadap praktik korupsi. Lebih jauh lagi, praktik korupsi dalam pelayanan publik memiliki pengaruh langsung terhadap berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menghalangi investasi, serta menyebabkan ketidakadilan sosial (Zuhro, 2019). Dengan demikian, diskusi mengenai korupsi di sektor publik tidak bisa terpisahkan dari bahasan mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Konsep Good Governance dan Tantangan Implementasinya

Good Governance adalah konsep tata kelola yang menekankan transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, partisipasi publik, efektivitas, dan keadilan (World Bank, 1992; UNDP, 1997). Prinsip ini dianggap mampu menghasilkan pemerintahan yang jujur dan terbuka, yang dapat menurunkan kemungkinan terjadinya korupsi.

Menurut Sedarmayanti (2012), Good Governance berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, akuntabilitas. menjamin bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan yang mereka ambil, sedangkan. partisipasi publik memberikan masyarakat kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pembentukan kebijakan serta pelaksanaannya.

Namun, implementasi Good Governance di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural, di antaranya:

- Budaya patronase patrimonialisme, dan yang menyebabkan aparat birokrasi lebih setia kepada kepentingan elite dibandingkan dengan kepentingan masyarakat umum (Suwarno, 2020).
- Lemahnya penegakan hukum, dengan sejumlah anggota kepolisian yang sering terlibat dalam praktik korup (Butt, 2011)
- Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, terutama disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi dan pendidikan politik yang minim (Setiyono & McLeod, 2020)
- Resistensi di dalam birokrasi, di mana reformasi terhambat oleh individu-individu yang diuntungkan oleh keadaan yang ada (Dwiyanto, 2018).

Keadaan ini mengindikasikan bahwa walaupun dasar-dasar pengelolaan Good Governance telah secara resmi diintegrasikan ke dalam undang-undang di Indonesia, pelaksanaannya di lapangan masih mengalami tantangan yang besar.

3. Strategi Pencegahan Korupsi dalam Literatur Akademik

Literatur ilmiah menyediakan berbagai cara untuk mengatasi korupsi dalam pelayanan publik di Indonesia, meliputi:

1. Penguatan Institusi dan Penegakan Hukum
Keberadaan lembaga yang bebas dari pengaruh, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah langkah penting dalam usaha memerangi korupsi (Butt, 2011). Namun, untuk memperkuat institusi ini, penegakan perlu hukum adanya yang pegawai negeri yang lebih baik (Dwiyanto, 2018).berkesinambungan serta integritas dari para penegak hukum.
2. Digitalisasi Pelayanan Publik (Egovernment) Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik telah terbukti dapat efektif dalam mengurangi praktik korupsi dengan mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat (Pratama, 2020). Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha di Indonesia adalah contoh nyata dari digitalisasi yang meningkatkan transparansi.
3. Transparansi Keterbukaan Anggaran dan Informasi Publik Transparansi informasi anggaran melalui sistem anggaran yang terbuka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kebijakan pemerintah, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan terjadinya. Korupsi (Setiyono dan McLeod, 2010).

4. Penguatan Komunitas dan Partisipasi Warga Pendekatan ini menaruh perhatian pada keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan publik melalui forum konsultasi, media independen, serta gerakan sosial yang berfokus pada pemberantasan korupsi (Zuhro, 2019).
5. Mengembangkan Etika dan Budaya Integritas
Upaya pencegahan korupsi juga perlu diarahkan untuk mengubah budaya birokrasi dengan cara memberikan. Pendidikan etika, menanamkan prinsip-prinsip integritas, dan menciptakan insentif untuk mendorong kinerja.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian literature review. Literature review merupakan pemaparan mengenai teori, penemuan dan sebagai bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari sumber acuan untuk dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian, guna untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas terkait dengan perumusan masalah yang ingin diteliti.

Penulis merangkum, membuat, menganalisis, dan melakukan sintesis. secara kritis dan mendalam dari literatur yang ada. Tinjauan literatur yang berkualitas adalah yang mengevaluasi mutu dan hasil dari suatu karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Praktik Korupsi dalam Pelayanan Publik

Di area publik, korupsi biasanya muncul dalam beragam jenis, mulai dari yang kecil hingga yang berskala besar, Beberapa jenis praktik korupsi yang paling sering terjadi antara lain:

- Pemerasan atau Pemungutan liar (pungli): Tindakan ini umum terjadi di kantor pencatatan sipil, untuk izin. usaha, dan juga di bidang kesehatan. Ombudsman Republik Indonesia (2021) melaporkan bahwa warga masih dibebani dengan biaya tambahan saat pengurusan dokumen pencatatan sipil, padahal seharusnya layanan ini tanpa biaya.
- Penyalahgunaan Orang-orang yang memiliki posisi kekuasaan tinggi seringkali menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, contohnya, mempercepat prosedur persetujuan bagi individu yang memberikan suap tertentu (Kurniawan, 2017).
- Kolusi dalam pengadaan barang/jasa: Kasus korupsi terkait proyek e-KTP yang mengakibatkan kerugian sebesar 2,3 triliun rupiah kepada negara menunjukkan lemahnya pengawasan dalam birokrasi (ICW, 2021).
- Nepotisme dalam praktik rekrutmen: Praktik rekrutmen di sektor publik sering kali dipengaruhi oleh hubungan keluarga atau afiliasi politik yang lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan atau keahlian (Dwiyanto, 2018).
- Manipulasi anggaran: Pengelolaan anggaran yang dibesar-besarkan untuk proyek infrastruktur daerah masih sering dijumpai, yang pada akhirnya berdampak negatif pada keuangan publik (Rose-Ackerman, 1999).

Tindakan-tindakan ini tidak hanya merusak mutu pelayanan kepada publik, tetapi juga menyebabkan ketidakadilan sosial serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Zuhro, 2019).

2. Tantangan Implementasi Good Governance

Walaupun prinsip-prinsip Good Governance telah ditetapkan sebagai pedoman, pelaksanaannya masih menemui berbagai masalah yang serius. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- Budaya birokrasi yang mengutamakan patronase politik Birokrasi cenderung lebih setia kepada kepentingan kelompok elit. Politik daripada kepentingan masyarakat umum (Suwarno, 2020).
- Penegakan hukum tidak optimal yang Penegak hukum sering kali terlibat dalam tindakan korup, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Butt, 2011).
- Rendahnya keterlibatan publik. Terbatasnya akses informasi publik dan rendahnya edukasi politik membuat masyarakat sulit untuk melakukan pengawasan yang efektif (Setiyono dan McLeod, 2010).
- Ketahanan dalam birokrasi Upaya reformasi birokrasi sering kali terhalang oleh individu-individu yang diuntungkan dari situasi yang ada (Dwiyanto, 2018),

Fakta ini menunjukkan bahwa Good Governance tidak hanya berkaitan dengan adanya regulasi, tetapi juga memerlukan kesungguhan dalam pelaksanaan dan pengawasan.

3.Strategi Pencegahan Korupsi dalam Pelayanan Publik

Literatur akademik memberikan beragam pendekatan yang bisa diterapkan di Indonesia, antara lain:

- Meningkatkan lembaga antikorupsi: Memperkuat kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta memastikan kerja sama yang baik dengan lembaga hukum lainnya (Butt, 2011).
- Digitalisasi pelayanan publik (egovernment): Sistem digital seperti Online Single Submission (OSS) dan aplikasi Laporkor dapat menekan korupsi dengan mengurangi interaksi langsung antara aparat dan masyarakat (Pratama, 2020).
- Keterbukaan anggaran dan penyampaian informasi: Sistem anggaran yang transparan memungkinkan masyarakat terlibat dalam mengawasi penggunaan dana publik (Setiyono dan McLeod, 2010).
- yang Memperkuat peran masyarakat sipil: ICW, media yang independen, serta gerakan anti-korupsi sosial terbukti penting dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang serius, termasuk berkaitan dengan program kesejahteraan sosial selama COVID19 (Zuhro, 2019).
- Mendorong budaya integritas: Pendidikan etika, penerimaan. pegawai berdasarkan kinerja, dan pembuatan insentif bagi karyawan yang jujur merupakan bagian dari jangka panjang reformasi (Dwiyanto, 2018).

4.Implikasi terhadap Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Diskusi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di sektor publik membutuhkan sinergi antara tiga pemangku kepentingan utama: pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Penegakan hukum yang kuat harus dipadukan dengan pemanfaatan teknologi yang transparan dan partisipasi aktif warga negara.

Implikasi praktisnya adalah:

- Pemerintah harus menjunjung tinggi independensi lembaga antikorupsi.
- Digitalisasi layanan publik harus diperluas hingga ke tingkat daerah.
- Kesadaran publik dan keterlibatan politik harus ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan publik.
- Birokrasi harus bertransisi dari sistem berbasis patronase menjadi sistem berbasis meritokrasi dan berbasis kinerja.

Dengan kombinasi strategi ini, tujuan layanan publik yang bersih, akuntabel, dan beretika dapat tercapai.

REFERENSI

- Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Good Maolani, M. (2023). Sistem Akuntabilitas Publik dan Tantangan Governance. *Jurnal Dialektika*, 17(2), 112-125.
- Rasul, S. (2012). Korupsi dalam Pelayanan Publik dan Tantangan Good Governance. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42(3), 389-402.
- Satria, R. (2021). Pencegahan Korupsi dalam Pelayanan Publik melalui Kebijakan Kriminal. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 45-60. (2023).
- Sutopo, B. (2019). Dampak Pelayanan Korupsi terhadap dan Mutu Publik. *Jurnal Efisiensi Administrasi Negara*, 15(1), 77-90.
- Yandri, I. (2023). E-Government dan Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Etika Administrasi Publik sebagai Instrumen Menara Ilmu*, 17(4), 33-41.
- Yuniningsih, T., Widianingsih, I., A. & Pramusinto, Pencegahan Korupsi. *Reformasi*, 13(2), 67-82.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Causes, Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- Peixoto, T., & Fox, J. (2016). When Does ICTS Help Combat Corruption? (artikel/chapters tentang teknologi & akuntabilitas).
- Heeks, R. (2002). *Information Systems and Developing Countries: Failure, Success, and Local Improvisations*. (tinjauan e-government).
- OECD (various). *Publications on public integrity and public procurement*.
- World Bank (Governance publications) mis. *World Development Report dan kajian governance*.
- Butt, S. (2011). Anti-Corruption Reform in Indonesia: An Obituary?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), 381-394.
- ICW. (2021). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Kurniawan, T. (2017). Korupsi Birokrasi di Indonesia: Studi pada Sektor Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 115-130.